

ABSTRAK

Muhammad Bentar Bahrul Ulum: Hak-Hak Keperdataan Anak Diluar Nikah Perspektif Madzhab Abu Hanifah Dengan Madzhab Syafi'i Dan Relevansinya Terhadap Maqashidus Syari'ah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilahirkan anak didalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak diluar nikah. Anak diluar nikah selama ini juga memiliki ststatus dan hak-haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak keperdataan anak di luar nikah menurut perspektif Madzhab Abu Hanifah dan Syafi'i serta relevansinya terhadap Maqashidus Syari'ah. Anak yang lahir di luar nikah, atau anak hasil zina, memiliki posisi hukum yang unik dalam hukum Islam. Mazhab Hanafi dan Syafi'i, dua dari empat mazhab utama dalam Islam, memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak-hak keperdataan anak tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan komparatif terhadap kitab-kitab klasik dari kedua madzhab, serta analisis terhadap prinsip-prinsip Maqashidus Syari'ah. Penelitian ini juga mempertimbangkan hukum positif di beberapa negara Muslim untuk melihat penerapan praktis dari pandangan-pandangan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Madzhab Abu Hanifah memberikan hak-hak yang lebih luas bagi anak di luar nikah, termasuk hak nafkah dari ibu dan kerabat ibu serta hak waris yang lebih fleksibel. Madzhab Syafi'i, di sisi lain, lebih ketat dengan membatasi hak-hak tersebut, terutama terkait nasab dan hak waris dari ayah biologis. Kedua madzhab sepakat bahwa anak di luar nikah tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologis dalam hal nasab. Dalam perspektif Maqashidus Syari'ah, perlindungan terhadap anak di luar nikah dapat dilihat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan hak asasi manusia. Pendekatan Madzhab Abu Hanifah yang lebih inklusif dapat dianggap lebih sesuai dengan tujuan Maqashidus Syari'ah dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak. Kesimpulannya, perbedaan pandangan antara Madzhab Abu Hanifah dan Syafi'i menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi anak di luar nikah.

Kata kunci: Hak Anak, Nikah, Madzhab, Maqashidus Syari'ah